



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AHMAD HUSNI TAMRIN
2. Jabatan : HAKIM TINGGI
3. NHK : 27685

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.606.791.133**

1. Tanah Seluas 402 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, Rp. 192.050.000
2. Tanah Seluas 3.510 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, Rp. 345.384.000
3. Tanah Seluas 1.173 m2 di KAB / KOTA NGANJUK, Rp. 73.974.075
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/200 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 857.850.000
5. Tanah Seluas 1.590 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, Rp. 204.750.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/50 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 987.456.928
7. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/250 m2 di KAB / KOTA KEDIRI, HASIL SENDIRI Rp. 945.326.130

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **250.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000
2. MOTOR, YAMAHA -NMAX ABS 2DP Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000
4. MOTOR, YAMAHA GRAND FILANO SEPEDA MOTOR Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	41.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	69.005.951
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.966.797.084
III. HUTANG	Rp.	1.024.158.244
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.942.638.840

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.